

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2023**

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN ACEH (567392)
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN (09)
KEMENTERIAN PERTANIAN (018)

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023



Jl. P. Nyak Makam No. 27 Kota Baru - Banda Aceh

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BPSIP Aceh adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPSIP Aceh mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan Negara pada BPSIP Aceh. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Banda Aceh, 31 Desember 2023
Kepala BPSIP Aceh

Firdaus, SP, M.Si
NIP. 197108052006041002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iv
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	v
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	1
II. NERACA	2
III. LAPORAN OPERASIONAL	3
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	4
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	5
A. PENJELASAN UMUM	5
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis BPSIP Aceh	5
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	5
A.3. Basis Akuntansi	5
A.4. Dasar Pengukuran	6
A.5. Kebijakan Akuntansi	6
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	12
B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	12
B.2. Belanja	14
B.3. Belanja Pegawai	15
B.4. Belanja Barang	15
B.5. Belanja Modal	16
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	17
C.1. Aset Lancar	17
C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran	17
C.1.2. Persediaan	17
C.1.3. Piutang Bukan Pajak	18
C.2. Aset Tetap	18
C.2.1. Tanah	18
C.2.2. Peralatan dan Mesin	19
C.2.3. Gedung dan Bangunan	19
C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	20
C.2.5. Aset Tetap Lainnya	20
C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	21
C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	22

C.3. Piutang Jangka Panjang.....	22
C.4. Aset Lainnya	22
C.4.1. Aset Tak Berwujud.....	22
C.4.2. Aset Lain-lain.....	23
C.4.3. Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	23
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	23
C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga	23
C.5.2. Uang Muka di KPPN	24
C.6. Ekuitas	24
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL.....	25
D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	25
D.2. Beban Pegawai.....	25
D.3. Beban Persediaan	26
D.4. Beban Barang dan Jasa	27
D.5. Beban Pemeliharaan	28
D.6. Beban Perjalanan Dinas.....	28
D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	29
D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi	29
D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.....	30
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	31
E.1. Ekuitas Awal.....	31
E.2. Surplus/Defisit-LO.....	31
E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	31
E.4. Transaksi Antar Entitas.....	31
E.4.1. Diterima Dari Entita Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)	31
E.4.2. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung	32
E.5. Ekuitas Akhir	32
F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.....	33
F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca.....	33
F.2. Pengungkapan Lain-lain	33

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan BPSIP Aceh yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Banda Aceh, 31 Desember 2023
Kepala BPSIP Aceh

Firdaus, SP, M.Si
NIP. 197108052006041002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BPSIP Aceh Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 248.453.425,00 atau mencapai 248,06% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 100.160.000,00.

Realisasi Belanja Negara TA 2023 adalah sebesar Rp. 8.798.567.306,00 atau mencapai 93,29% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 9.436.650.000,00.

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023.

Nilai aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 168.445.124.684,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 85.352.360,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 168.168.922.948,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp. 0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 190.849.376,00.

Nilai kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. -16.523.184,00 dan Rp. 168.461.647.868,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 198.576.760,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 10.278.357.355,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp. -10.079.780.595,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp. 54.126.665,00 dan Defisit Rp. 0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. -10.025.653.930,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp. 169.937.187.917,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp. -10.025.653.930,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas

sebesar Rp. 8.550.113.881,00 sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp. 168.461.647.868,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BPSIP ACEH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN
31 DESEMBER 2022

Uraian	Catatan	31 Desember 2023			31 Desember 2022
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	100.160.000,00	248.453.425,00	248,06	241.212.574,00
Jumlah Pendapatan		100.160.000,00	248.453.425,00	248,06	241.212.574,00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	4.936.063.000,00	4.927.209.449,00	100	5.583.876.913,00
Belanja Barang	B.4.	4.500.587.000,00	3.871.357.857,00	86	2.683.042.257,00
Belanja Modal	B.5.	0,00	0,00	0	149.880.000,00
Jumlah Belanja		9.436.650.000,00	8.798.567.306,00	93	8.416.799.170,00

II. NERACA

BPSIP ACEH
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 dan 31 DESEMBER 2022

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1.	0,00	0,00
Persediaan	C.1.2.	85.352.360,00	99.396.300,00
Piutang Bukan Pajak	C.1.3.	0,00	0,00
Jumlah Aset Lancar		85.352.360,00	99.396.300,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	148.263.738.880,00	148.263.738.880,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	8.220.950.324,00	12.127.776.732,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	23.946.731.437,00	24.052.918.437,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	288.381.000,00	288.381.000,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	60.750.000,00	60.750.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6.	222.000.000,00	222.000.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7.	-12.833.628.693,00	-15.300.255.911,00
Jumlah Aset Tetap		168.168.922.948,00	169.715.309.138,00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.4.1.	6.115.000,00	11.673.573,00
Aset Lain-lain	C.4.2.	4.361.608.981,00	1.137.995.000,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.3.	-4.176.874.605,00	-1.012.615.479,00
Jumlah Aset Lainnya		190.849.376,00	137.053.094,00
Jumlah Aset		168.445.124.684,00	169.951.758.532,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1.	16.523.184,00	14.570.615,00
Uang Muka dari KPPN	C.5.2.	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		16.523.184,00	14.570.615,00
Jumlah Kewajiban		16.523.184,00	14.570.615,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.6.	168.428.601.500,00	169.937.187.917,00
Jumlah Ekuitas		168.428.601.500,00	169.937.187.917,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		168.445.124.684,00	169.951.758.532,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

BPSIP ACEH
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN
31 DESEMBER 2022

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	198.576.760,00	133.776.530,00
JUMLAH PENDAPATAN		198.576.760,00	133.776.530,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	4.927.209.449,00	5.583.876.913,00
Beban Persediaan	D.3.	355.044.940,00	509.840.307,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	2.116.457.448,00	1.353.715.285,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	556.981.200,00	507.145.450,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	860.545.778,00	356.133.981,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7.	2.575.000,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8.	1.492.589.908,00	1.592.034.856,00
JUMLAH BEBAN		10.311.403.723,00	9.902.746.792,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-10.112.826.963,00	-9.768.970.262,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.9.	109.055.000,00	104.500.000,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	135.900.000,00	98.910.065,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	22.595.000,00	4.590.000,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.9.	54.126.665,00	97.071.044,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-10.058.700.298,00	-9.671.899.218,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BPSIP ACEH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 dan
31 DESEMBER 2022**

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
EKUITAS AWAL	E.1.	169.937.187.917,00	171.433.386.319,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-10.058.700.298,00	-9.671.899.218,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	0,00	114.220,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	8.550.113.881,00	8.175.586.596,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		-1.508.586.417,00	-1.496.198.402,00
EKUITAS AKHIR	E.5.	168.428.601.500,00	169.937.187.917,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

*Profil dan Kebijakan
Teknis*

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis BPSIP Aceh

Pembangunan pertanian memerlukan sebuah standar instrumen pertanian demi menjamin mutu dari proses dan produk hasil pertanian. Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) lahir pada 21 September 2022 melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 yang memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian menyelenggarakan fungsi:

Penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian;

Pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta standar instrumen pertanian;

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian;

Pelaksanaan tugas administrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

*Pendekatan
Penyusunan Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPSIP Aceh. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian/Lembaga.

SAKTI terdiri dari *General Ledger* dan Pelaporan (GLP) dan Aset Tetap. SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca. Sedangkan Aset tetap adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik Negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

BPSIP Aceh menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPSIP Aceh dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPSIP Aceh yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPSIP Aceh adalah sebagai berikut:

Pendapatan - LRA

(1) Pendapatan – LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan - LO

(2) Pendapatan – LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/ atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan, sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - (a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/ atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - (b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/ DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut diatas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset tetap pada ENtitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel Masa Manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/ dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penjelasan Atas Pos-
Pos Laporan
Realisasi Anggaran

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, BPSIP Aceh telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	86.360.000,00	86.360.000,00
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	13.800.000,00	13.800.000,00
Jumlah Pendapatan	100.160.000,00	100.160.000,00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.377.436.000,00	4.936.063.000,00
Belanja Barang Operasional	747.790.000,00	747.790.000,00
Belanja Barang Non Operasional	308.539.000,00	1.325.558.000,00
Belanja Barang Persediaan	172.800.000,00	354.587.000,00
Belanja Jasa	224.952.000,00	343.852.000,00
Belanja Pemeliharaan	557.300.000,00	557.300.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	288.000.000,00	1.171.500.000,00
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	0,00	0,00
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Jumlah Belanja	7.676.827.000,00	9.436.650.000,00

Penerimaan Negara
Bukan Pajak
Rp. 248.453.245,00

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 248.453.245,00 atau mencapai 248,06% dari estimasi

pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 100.160.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	13.800.000,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	86.360.000,00	248.453.425,00	287,70
Jumlah	100.160.000,00	248.453.425,00	248,06

Realisasi pendapatan TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 3,08% dibandingkan TA 2022. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada BPSIP Aceh adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	%
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	248.453.425,00	241.027.509,00	3,08
Jumlah	248.453.425,00	241.027.509,00	3,08

Realisasi pendapatan PNBPN senilai Rp. 248.453.425,00. Namun pada Laporan Operasional senilai Rp. 198.576.760,00. Sehingga terdapat selisih senilai Rp. 49.876.665,00 berupa pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin.

Belanja
Rp. 8.798.567.306,00

B.2. Belanja

Realisasi Belanja pada TA 2023 adalah sebesar Rp. 8.798.567.306,00 atau 93,29% dari anggaran belanja sebesar Rp. 9.436.650.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2023

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Akun Belanja			
Belanja Pegawai	4.936.063.000,00	4.932.050.153,00	99,92
Belanja Barang	4.500.587.000,00	3.871.357.857,00	86,02
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Total Belanja Kotor	9.436.650.000,00	8.803.408.010,00	93,29
Pengembalian Belanja	0,00	4.840.704,00	100,00
Total Belanja	9.436.650.000,00	8.798.567.306,00	93,29

Dibandingkan dengan Tahun 2022, Realisasi Belanja TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 4,59% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan antara lain:

1. Adanya 2 orang pegawai yang pensiun pada Tahun 2023.
2. Meningkatnya belanja barang karena adanya perubahan nomenklatur sehingga adanya renovasi papan nama dan belanja seragam.
3. Tidak adanya realisasi belanja modal

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	%
Belanja Pegawai	4.932.050.153,00	5.583.876.913,00	-11,67
Belanja Barang	3.871.357.857,00	2.683.042.257,00	44,29
Belanja Modal	0,00	149.880.000,00	-100
Total Belanja	8.803.408.010,00	8.416.799.170,00	4,59

Belanja Pegawai
Rp. 4.927.209.449,00

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.927.209.449,00 dan Rp. 5.583.876.913,00. Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2023 mengalami penurunan sebesar 11,76% dari TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh: Adanya 2 (dua) orang pegawai yang pensiun pada tahun 2023.

Perbandingan Belanja Pegawai
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4.932.050.153,00	5.584.802.175,00	-11,69
Jumlah Belanja Kotor	4.932.050.153,00	5.584.802.175,00	-11,69
Pengembalian Belanja Pegawai	-4.840.704,00	-925.262,00	80,89
Jumlah Belanja	4.927.209.449,00	5.583.876.913,00	-11,76

Realisasi belanja pegawai pada LRA - Laporan Operasional (LO) telah sesuai.

Realisasi belanja pegawai senilai Rp. 4.927.209.449,00, sedangkan pada penjumlahan Neraca Percobaan Kas senilai Rp. 4.932.050.153,00 sehingga terdapat selisih senilai Rp. 4.840.704,00 berupa pengembalian gaji pokok pegawai dikarenakan pegawai tersebut telah pensiun pada bulan April namun gaji bulan Mei masih dibayarkan.

Belanja Barang
Rp. 3.871.357.857,00

B.4. Belanja Barang

Realisasi belanja barang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.871.357.857,00 dan Rp. 2.683.042.257,00. Realisasi belanja barang mengalami kenaikan sebesar 44,29% dari TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Kegiatan sudah kembali berjalan setelah adanya pemblokiran dana pagu anggaran hingga bulan Mei 2023.

Perbandingan Belanja Barang
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	742.300.000,00	706.565.000,00	5,06
Belanja Barang Non Operasional	1.075.990.000,00	459.340.500,00	57,31
Belanja Barang Persediaan	339.326.000,00	455.811.300,00	-25,56
Belanja Jasa	296.214.879,00	198.692.026,00	49,08
Belanja Pemeliharaan	556.981.200,00	506.499.450,00	9,97
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	860.545.778,00	356.133.981,00	58,62
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	3.871.357.857,00	2.683.042.257,00	44,29
Pengembalian Belanja Barang	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	3.871.357.857,00	2.683.042.257,00	44,29

Belanja Modal
Rp. 0,00

B.5. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 149.880.000,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar 100,00% dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Tidak adanya realisasi belanja modal dikarenakan tidak adanya persetujuan dari Menteri Pertanian atas pembelian produk dari luar negeri sehingga selanjutnya di revisi.

Perbandingan Belanja Modal
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	149.880.000,00	-100
Jumlah Belanja Kotor	0,00	149.880.000,00	-100
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	0,00	149.880.000,00	-100

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Aset Lancar

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp. 0,00*

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
Per 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2023
Kas di bendahara Pengeluaran Berupa Uang Persediaan (UP)	0,00
Jumlah	0,00

*Persediaan
Rp. 85.352.360,00*

C.1.2. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 85.352.360,00 dan Rp. 99.396.300,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/ atau untuk dijual, dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Barang Konsumsi	25.377.360,00	41.136.300,00
Bahan untuk Pemeliharaan	0,00	0,00
Bahan Baku	0,00	58.260.000,00
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	59.975.000,00	0,00
Jumlah	85.532.360,00	99.396.300,00

Piutang Bukan Pajak
Rp. 74.750.000,00

C.1.3. Piutang Bukan Pajak

Saldo piutang bukan pajak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 74.750.000,00 dan Rp. 0,00. Piutang bukan pajak merupakan piutang yang berasal dari penerimaan Negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Rincian piutang bukan pajak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Piutang Bukan Pajak
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Piutang Bukan Pajak	74.750.000,00	0,00
Jumlah	74.750.000,00	0,00

Terdapat piutang bukan pajak yang merupakan kelebihan pembayaran pada tunjangan fungsional Peneliti yang beralih jabatan ke PMHP.

C.2. Aset Tetap

Tanah
Rp. 148.263.738.880,00

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki BPSIP Aceh per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 148.263.738.880,00 dan Rp. 148.263.738.880,00. Adapun mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	148.263.738.880,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	0,00
Mutasi Kurang	
Revaluasi Aset	0,00
Penghapusan	0,00
Saldo per 31 Desember 2023	148.263.738.880,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	0,00
Nilai Buku per 31 Desember 2023	148.263.738.880,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan tanah adalah berupa:

Reklasifikasi Masuk atas tanah kebun percobaan yang berlokasi di Bener Meriah yang dikarenakan kesalahan pencatatan untuk luas tanah kebun dari sebelumnya seluas 142.735 m² menjadi 67.919 m².

Mutasi kurang atas nilai tanah senilai Rp. 12.085.322.000,00 (dua belas milyar delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah), berasal dari:

Reklasifikasi keluar atas tanah kebun percobaan yang berlokasi di Bener Meriah yang dikarenakan kesalahan pencatatan untuk luas tanah kebun dari sebelumnya seluas 142.735 m² menjadi 67.919 m².

Peralatan dan Mesin
Rp. 8.220.950.324,00

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki BPSIP Aceh per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 8.220.950.324,00 dan Rp. 12.127.776.732,00. Rincian mutasi peralatan dan mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	12.192.291.732,00
Mutasi tambah:	
Pembelian	2.082.000,00
Hibah	0,00
Transfer Masuk	0,00
Koreksi Tambah	0,00
Mutasi Kurang:	
Koreksi pencatatan atas normalisasi BMN	0,00
Akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	3.919.508.408,00
Saldo Per 31 Desember 2023	8.274.865.324,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-7.073.105.539,00
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	1.147.844.785,00

Gedung dan Bangunan
Rp. 23.946.731.437,00

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki BPSIP Aceh per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar

Rp. 23.946.731.437,00 dan Rp. 24.052.918.437,00. Rincian mutasi gedung dan bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	24.052.918.437,00
Mutasi tambah:	
Pembangunan Gedung	0,00
Mutasi Kurang:	
Akumulasi Penyusutan asset tetap	106.187.000,00
Saldo Per 31 Desember 2023	23.946.731.437,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-5.685.427.524,00
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	18.261.303.913,00

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp. 288.381.000,00

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki BPSIP Aceh per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 288.381.000,00 dan Rp. 288.381.000,00. Rincian mutasi jalan, irigasi dan jaringan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	288.381.000,00
Mutasi tambah:	
Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi	0,00
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan	0,00
Saldo Per 31 Desember 2023	288.381.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	0,00
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	213.285.370,00

Aset Tetap Lainnya
Rp. 60.750.000,00

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai aset tetap lainnya yang dimiliki BPSIP Aceh per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 60.750.000,00 dan Rp. 60.750.000,00. Rincian aset tetap lainnya sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	94.750.000,00
Mutasi tambah:	
-	0,00
Mutasi Kurang:	
Akumulasi penyusutan asset tetap	34.000.000,00
Saldo Per 31 Desember 2023	60.750.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	0,00
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	60.750.000,00

Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp. 222.000.000,00

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki BPSIP Aceh per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 222.000.000,00 dan Rp. 222.000.000,00 yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang diproses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Rincian lebih lanjut dari Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran. Yang dirincikan sebagai berikut:

1. Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan senilai Rp. 37.000.000,00 tahun peroleh 2016. Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Gedung dan Bangunan untuk Toko Tani, Pekerjaan tidak dilanjutkan karena anggaran untuk pembangunan fisik tidak tersedia.
2. Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan senilai Rp. 45.000.000,00 tahun peroleh 2016. Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Gedung dan Bangunan untuk Gudang UPBS. Pekerjaan Tidak dilanjutkan karena anggaran untuk pembangunan fisik tidak tersedia
3. Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan senilai Rp. 13.800.000,00 tahun peroleh 2020. Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Gedung dan Bangunan untuk Saung Tani yang berlokasi di Kebun Percobaan Gayo Bener Meriah.
4. Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan senilai Rp. 93.550.000,00 tahun peroleh 2020. Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Pagar Kebun yang berlokasi di Kebun Percobaan Gayo Bener Meriah
5. Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan senilai Rp. 21.000.000,00 tahun peroleh 2020. Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Renovasi Rumah Negara yang berlokasi di Kebun Percobaan Gayo Bener Meriah

Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan senilai Rp. 11.650.000,00 tahun peroleh 2020. Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Renovasi Gedung Aula yang berlokasi di BPSIP Aceh.

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp. -12.833.628.693,00

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki BPSIP Aceh per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. -12.833.628.693,00 dan Rp. -15.300.255.911,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk tanah dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	12.127.776.732,00	-7.073.105.539,00	1.147.844.785,00
2.	Gedung dan Bangunan	23.946.731.437,00	5.685.427.524,00	18.261.303.913,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	288.381.000,00	75.095.630,00	213.285.370,00
4.	Aset Tetap Lainnya	60.750.000,00	0,00	60.750.000,00
Akumulasi Penyusutan		36.529.826.169,00	-1.312.582.385,00	19.683.184.068,00

Piutang Jangka Panjang
Rp. 0,00

C.3. Piutang Jangka Panjang

Piutang jangka panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Adapun nilai piutang jangka panjang yang dimiliki BPSIP Aceh per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,00.

C.4. Aset Lainnya

Aset Tak Berwujud
Rp. 6.115.000,00

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 6.115.000,00 dan Rp. 11.673.573,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Software	6.115.000,00
Jumlah	6.115.000,00

Aset Lain-Lain
Rp. 4.361.608.981,00

C.4.2. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki BPSIP Aceh per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.361.608.981,00 dan Rp. 1.137.995.000,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional BPSIP Aceh serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Akumulasi Penyusutan/
Amortisasi Aset Lainnya
Rp. -4.176.874.605,00

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki BPSIP Aceh per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. -4.176.874.605,00 dan Rp. -1.012.615.479,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada lampiran laporan keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	6.115.000,00	-6.115.000,00	0,00
2.	Aset Lain-lain	4.361.608.981,00	-4.181.059.605,00	190.849.376,00
Akumulasi Penyusutan		4.367.723.981,00	-4.187.174.605,00	190.849.376,00

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Utang kepada Pihak Ketiga
Rp. 16.523.184,00

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 16.523.184,00 dan Rp. 14.570.615,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada BPSIP Aceh per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0,00	0,00
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	16.523.184,00	14.570.615,00
Jumlah	16.523.184,00	14.570.615,00

Selain itu, adanya kurang bayar tunjangan jabatan fungsional dan gaji senilai Rp. 1.846.700,00.

Uang Muka di KPPN
Rp. 0,00

C.5.2. Uang Muka di KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Ekuitas
Rp. 168.428.601.500,00

C.6. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 168.428.601.500,00 dan Rp. 169.937.187.917,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan Negara
Bukan Pajak Lainnya
Rp. 198.576.760,00

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 198.576.760,00 dan Rp. 133.776.530,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNPB Lainnya
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	176.075.000,00	114.175.000,00	54,22
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	22.501.760,00	19.601.530,00	14,80
Jumlah	198.576.760,00	133.776.530,00	48,44

Terjadinya peningkatan pendapatan pada 31 Desember 2023 dibandingkan 31 Desember 2022 sejumlah 48,44% dikarenakan:

1. Adanya penambahan sewa rumah dinas dan penjualan hasil pertanian.

Pendapatan Negara bukan pajak lainnya pada LO senilai Rp. 198.576.760,00 namun pada LRA senilai Rp. 248.453.425,00. Terdapat selisih senilai Rp. 49.876.665,00 berupa pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin.

Beban Pegawai
Rp. 4.927.209.449,00

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.927.209.449,00 dan Rp. 5.583.876.913,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. 1

Perbandingan Beban Pegawai
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	3.354.418.360,00	3.712.867.940,00	-9,65
Beban Pembulatan Gaji PNS	46.460,00	50.741,00	-8,44

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Tunj. Anak PNS	82.126.514,00	91.401.554,00	-10,15
Beban Tunj. Beras PNS	205.021.020,00	222.836.340,00	-7,99
Beban Tunj. Fungsional PNS	364.250.000,00	507.330.000,00	-28,20
Beban Tunj. PPh PNS	11.002.085,00	19.007.938,00	-42,12
Beban Tunj. Struktural PNS	18.900.000,00	23.040.000,00	-17,97
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	257.948.010,00	276.786.400,00	-6,81
Beban Tunjangan Umum PNS	101.195.000,00	110.325.000,00	-8,28
Beban Uang Makan PNS	532.302.000,00	620.231.000,00	-14,18
Jumlah	4.927.209.449,00	5.583.876.913,00	-11,76

Beban Pegawai mengalami penurunan 11,76% dikarenakan adanya 2 orang pegawai yang pensiun pada tahun 2023.

Beban Pegawai pada LO senilai Rp. 4.927.209.449,00 sedangkan penjumlahan pada Neraca Percobaan Kas senilai Rp. 4.932.050.153,00 sehingga terdapat selisih senilai Rp. 4.840.704,00 yang merupakan pengembalian gaji pokok dan tunjangan umum pegawai.

Beban Persediaan
Rp. 355.044.940,00

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 355.044.940,00 dan Rp. 509.840.307,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Persediaan bahan baku	9.682.000,00	8.532.727,00	13,47
Beban Persediaan konsumsi	345.362.940,00	501.307.580,00	-31,11
Beban persediaan lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah	355.044.940,00	509.840.307,00	-30,36

Beban persediaan mengalami penurunan 30,36% dikarenakan adanya revisi dana pagu anggaran 2023.

Tidak adanya selisih beban persediaan pada LO – LRA.

*Beban Barang dan Jasa
Rp. 2.116.457.448,00*

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.116.457.448,00 dan Rp. 1.353.715.285,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Bahan	672.090.000,00	220.210.500,00	67,23
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	0,00	0,00
Beban Barang Operasional Lainnya	167.760.000,00	76.400.000,00	54,46
Beban Barang Non Operasional Lainnya	403.900.000,00	239.130.000,00	68,90
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	107.040.000,00	135.960.000,00	-21,27
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	0,00	0,00
Beban Jasa Profesi	34.800.000,00	1.000.000,00	97,13
Beban Keperluan Perkantoran	467.500.000,00	494.205.000,00	-5,40
Beban Langganan Air	8.516.420,00	389.175,00	94,15
Beban Langganan Listrik	168.962.814,00	144.288.975,00	-0,73
Beban Langganan Telepon	33.588.214,00	29.332.635,00	-4,11
Beban Sewa	52.300.000,00	12.000.000,00	77,06
Jumlah	2.116.457.448,00	1.353.715.285,00	53,90

Realisasi Beban Barang dan Jasa naik sebesar 53,90% dikarenakan kegiatan sudah mulai berjalan dan sudah tidak ada lagi dana pagu anggaran yang di blokir.

Beban Pemeliharaan
Rp. 556.981.200,00

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 556.981.200,00 dan Rp. 507.145.450,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	210.774.000,00	132.340.000,00	59,27
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	100.976.000,00	139.987.000,00	-27,87
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	245.231.200,00	234.172.450,00	4,72
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0,00	646.000,00	-100,00
Jumlah	556.981.200,00	507.145.450,00	9,83

Beban Pemeliharaan mengalami kenaikan sebesar 9,83% oleh beban persediaan bahan untuk pemeliharaan dan beban pemeliharaan gedung dan bangunan serta beban pemeliharaan peralatan dan mesin.

Beban Perjalanan Dinas
Rp. 860.545.778,00

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 860.545.778,00 dan Rp. 356.133.981,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	800.545.778,00	356.133.981,00	55,51

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	60.000.000,00	0,00	100
Jumlah	860.545.778,00	356.133.981,00	58,62

Beban Perjalanan naik 58,62% dikarenakan seluruh kegiatan sudah mulai berjalan setelah kembali buka blokir dana pagu anggaran tahun 2023.

*Beban Barang Untuk
Diserahkan Kepada
Masyarakat
Rp. 2.575.000,00*

D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.575.000,00 dan Rp. 0,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	2.575.000,00	0,00	100,00
Jumlah	2.575.000,00	0,00	100,00

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp. 1.492.589.908,00*

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.492.589.908,00 dan Rp. 1.592.034.856,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	948.585.875,00	953.835.091,00	-0,55
Beban Penyusutan Irigasi	8.605.944,00	8.605.944,00	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	16.305.555,00	4.613.364,00	71,71
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	518.032.534,00	623.920.457,00	-16,97
Jumlah	1.492.589.908,00	1.592.034.856,00	-6,25

Beban Penyusutan dan Amortisasi turun 6,25% dikarenakan penyusutan beban di Peralatan dan Mesin.

Surplus/Defisit dari
Kegiatan Non Operasional
Rp. 54.126.665,00

D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0,00	0,00	0,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	22.595.000,00	4.590.000,00	79,69
Pendapatan Pelepasan Aset	49.876.665,00	107.250.979,00	-53,50
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	109.055.000,00	104.500.000,00	4,36
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	135.900.000,00	98.910.065,00	37,40
Jumlah	54.126.665,00	97.071.044,00	-44,24

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp. 169.937.187.917,00

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 169.937.187.917,00 dan Rp. 171.433.386.319,00.

Surplus/Defisit-LO
Rp. -10.058.700.298,00

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. -10.058.700.298,00 dan Rp. -9.671.899.218,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Koreksi Yang Menambah/
Mengurangi Ekuitas Yang
Antara Lain Berasal Dari
Dampak Kumulatif Perubahan
Kebijakan Akuntansi/
Kesalahan Mendasar*
Rp. 0,00

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 114.220,00.

Transaksi Antar Entitas
Rp. 8.550.113.881,00

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 8.550.113.881,00 dan Rp. 8.175.586.596,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2023

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2023
Ditagihkan ke Entitas Lain	8.798.567.306,00
Diterima dari Entitas Lain	248.453.425,00
Jumlah	8.550.113.881,00

*Diterima Dari Entitas
Lain (DDEL)*
Rp. 248.453.425,00

E.4.1. Diterima Dari Entita Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas Negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2023 saldo DDEL adalah sebesar Rp. 248.453.425,00 sedangkan DKEL sebesar Rp. 8.798.567.306,00.

*Ditagihkan Ke Entitas
Lain (DKEL)*
Rp. 8.798.567.306,00

Pengesahan Hibah Langsung
Rp. 0,00

E.4.2. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung
Rp. 0,00

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Nilai Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Nilai pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1.	Nama Pemberi Hibah 1	Barang/Jasa/Lainnya	0,00
2.	Nama Pemberi Hibah 2	Barang/Jasa/Lainnya	0,00
3.	dst... (tolong diisikan semuanya)	Barang/Jasa/Lainnya	0,00
Jumlah Nilai Hibah			0,00

Ekuitas Akhir
Rp. 168.428.601.500,00

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 168.428.601.500,00 dan Rp. 169.937.187.917,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

*Kejadian-Kejadian
Penting Setelah
Tanggal Neraca*

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

1. Adanya utang kepada pihak ketiga senilai Rp. 16.523.184,00 berupa tagihan listrik, air dan telepon yang akan dibayar pada bulan Januari 2024.
2. Adanya to do list saldo akun tidak normal pada akun 212112 Belanja Barang yang masih harus dibayar senilai Rp. -16.523.184,00 disebabkan oleh kesalahan jurnal pada periode Desember 2023 dan telah dilakukan tutup buku permanen. Namun, telah dilakukan perbaikan jurnal pada periode ADJ 1 2023.
3. Adanya kelebihan pembayaran terhadap tunjangan fungsional peneliti senilai Rp. 74.750.000,00 dan telah diinput pada neraca akun piutang.
4. Adanya kekurangan bayar tunjangan jabatan fungsional dan gaji senilai Rp. 1.846.700,00 dan telah diinput pada neraca akun utang pihak ketiga.

*Pengungkapan Lain-
Lain*

F.2. Pengungkapan Lain-lain

1. Realisasi pendapatan PNBPNP senilai Rp. 248.453.425,00. Namun pada Laporan Operasional senilai Rp. 198.576.760,00. Sehingga terdapat selisih senilai Rp. 49.876.665,00 berupa pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin.
2. Pendapatan Negara bukan pajak lainnya pada LO senilai Rp. 198.576.760,00 namun pada LRA senilai Rp. 248.453.425,00. Terdapat selisih senilai Rp. 49.876.665,00 berupa pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin.
3. Beban Pegawai pada LO senilai Rp. 4.927.209.449,00 sedangkan penjumlahan pada Neraca Percobaan Kas senilai Rp. 4.932.050.153,00 sehingga terdapat selisih senilai Rp. 4.840.704,00 yang merupakan pengembalian gaji pokok dan tunjangan umum pegawai.